

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB- P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD
) KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Disusun oleh:

MULYA LIZA

NIM : 211000462201034

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
2023**

**THE INFLUENCE OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX
REVENUE (PBB-P2) AND DUTY FOR ACQUISITION OF LAND AND
BUILDING RIGHTS (BPHTB) ON REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD)
IN REGENCY/CITY IN WEST SUMATRA**

MULYA LIZA
211000462201034

MENTOR:

- 1. Dr. LILI WAHYUNI, SE, M.Si**
- 2. RITA DWI PUTRI, SE, M.Si**

ABSTRACT

This research aims to determine: (1) The influence of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on District/City Original Regional Income (PAD) in West Sumatra; (2) The influence of Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) on Regency/City Regional Original Income (PAD) in West Sumatra; and (3) The influence of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) and Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) on Regency/City Regional Original Income (PAD) in West Sumatra.

This research was conducted in all regencies/cities in West Sumatra Province in 2020-2021. The type of research used is quantitative research. The data used is secondary data, namely the 2020-2021 West Sumatra Province Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report. The sampling technique used was Total Sampling.

The results of the research show that: (1) Rural and Urban Land and Building Tax Revenue (PBB-P2) has an influence on Regency/City Original Regional Income (PAD) in West Sumatra, as evidenced by the tcount value of 3,488 which is greater than ttable at a significance level of 5 %, namely 2.028, then $3.488 > 2.028$ and the significant probability value is $(0.001 < 0.05)$; (2) Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) has no effect on Regency/City Regional Original Income (PAD) in West Sumatra, as evidenced by the t value of 0.777 which is smaller than t table at the 5% significant level, namely 2.028, so $0.777 < 2.028$ and the significant probability value is $(0.4423 > 0.05)$; (3) Rural and Urban Land and Building Tax Revenue (PBB-P2) and Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB) simultaneously influence Regency/City Regional Original Income (PAD) in West Sumatra, with a coefficient of determination (R^2) amounting to 0.926 or 92.6%, and the remaining 7.4% is determined by other variables outside the variables in this study.

Keywords: **Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2); Land and Building Rights Acquisition Fee (BPHTB); Regional Original Income (PAD)**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB- P2) DAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

MULYA LIZA
211000462201034

PEMBIMBING: 1. **Dr. LILI WAHYUNI, SE, M.Si**
2. **RITA DWI PUTRI, SE, M.Si**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat; (2) Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat; dan (3) Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Total Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,488 lebih besar dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 2,028, maka $3,488 > 2,028$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,001 < 0,05)$; (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 0,777 lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% yaitu 2,028, maka $0,777 < 2,028$ dan nilai probabilitas signifikan sebesar $(0,4423 > 0,05)$; (3) Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,926 atau 92,6%, dan sisanya sebesar 7,4% ditentukan oleh variabel lain di luar variabel pada penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, A., & Ramdan, A. (2020). Analisis pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Tanah Abang Satu tahun 2016-2018. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 79–85.
- Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta : Teras 2011.
- Ahmad Yani, S. H., & MM, A. K. (2009). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi). *Jakarta: Rajawali Pers*.
- Alfatarisya, A. (2022). *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Tanah, dan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Tangerang*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Asyhab, K. S. (2014). Dampak Penerimaan Daerah Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Berbasis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 3(2).
- Darise, N. (2009). Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. *Jakarta: Indeks*.
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2011.
- Fathurahman Ridho, Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2 dan Restoran Pada Penerapan Kebijakan Insentif Perpajakan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam di Masa Pandemi Covid-19, (2022).
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. *Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 490.
- Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Kunarto, V. (2013). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BEA Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung. *Undergraduate Thesis, Universitas Kristen Maranatha*.
- Kusuma, M. A., & Wirawati, N. P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana, (Online), Vol. 5, No. 3, (http://ojs.unud.ac.id, diakses 20 Agustus 2016)*.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan 2021.

Mardiasmo, M. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mustika, W. A., & Idayati, F. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 3(6), 1–24.

Normawati, Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: 2016.

Nurhidayah, Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten: 2016.

Pengolahan Data Statistik SPSS 26.0 (2021)

Paramita, R. W. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif : Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen Edisi 3 (Issue April). Widya Gama Press

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001, pasal 1 ayat 1 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi)*. Ed. IV. Yogyakarta: ANDI.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Rokhmat Subagiyo, S. E. (2017). *Metode penelitian ekonomi islam: konsep dan penerapan*. Alim's Publishing.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.

Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Buku 1*.

Setyawati, E. (2019). Tinjauan Hukum Kewajiban Verifikasi Dan Validasi Bea Perolehan Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Bagi Wajib Pajak Yang Mengikuti Pengampunan Pajak Di Kota Semarang. *SPEKTRUM HUKUM*, 14(2), 265–